

# **TERUMBU'S OBSERVATION AND MANAGEMENT AUTHORS AT BATAM'S CITY**

**RUSDY RIAULI**

**At Bimbing Oleh: Tuti Khairani**

**CP : 08526509994**

## **ABSTRACT**

Human activity in utilize resource terumbu's potency authors frequent intersecting and even a lot of within that activity cause terumbu's damage authors. In the meantime management terumbu authors is task of on duty naval agricultural fishery and forestry in resource management area naval as one at names deep Perda Batam's City No. 7 Years 2009 About Management terumbu Authors. But is in fact at the site Observation And Management Terumbu Authors At City Batam not walks optimal ala so intent attainment process is not maximal. There is aim even of this research is subject to be know terumbu's management observation authors that at do by on duty naval forestry agricultural fishery at Batam, and to know factor that constrain terumbu's management performing authors at Batam's City.

Cognitive concept that at utilizes is cognitive About Observation, Indicators in observational it, as supervisory as foreword, concurrent's observation and feedback observation. Meanwhile for factor what do regard observation success up on researches at the site informen in observational it is carry the wind on duty naval horticultural fishery and forestry is Batam's City, Areas sexy head naval Resourceand fishery on duty naval horticultural fishery And forestry is Batam's City, Area supervisor officer naval Resourceand fishery on duty naval horticultural fishery And forestry is Batam's City, Batam's City fisherman. in's research constitute kualitatif's descriptive research.

Of research result, can at concludes that controlling or observation is management function where role from personal already has task, authority and carries on its performing in this case on duty naval horticultural fishery And forestry is Batam's City needs to be done by observation in order to walks in one's line, need to mark sense observation step-up to society activity intensively, since more observation intensive gets to restrain in height breach zoom that did by society.

**Key word: terumbu authors, Observation, Management**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup semua bidang kehidupan. Karena itu, banyak sekali definisi mengenai administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dari administrasi. Tiga unsur ini pula yang merupakan pembeda apakah sesuatu kegiatan merupakan kegiatan administrasi atau tidak. Dari definisi administrasi yang ada, kita dapat mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan pemerintahan atau administrasi negara. Sebagai ilmu, administrasi mempunyai berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi negara.

Terdapat hubungan interaktif antara administrasi Negara dengan lingkungan sosialnya. Diantara berbagai unsure lingkungan sosial, unsure budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi penampilan administrasi negara.

sumber daya perairannya, Batam memiliki potensi sumber daya yang cukup andal bila di kelola dengan baik perairan ini memiliki berbagai ekosistem laut dangkal yang merupakan tempat hidup dan memijah ikan ikan laut seperti ekosistem mangrove lamun dan karang. seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan di segala bidang telah memberikan tekanan yang lebih besar terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya lingkungan perairan.

Betapa pentingnya pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan untuk mencegah tindakan-tindakan yang mengandung nilai negatif.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

#### **1. Pengawasan Intern dan Ekstern**

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan." Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

#### **2. Pengawasan Preventif dan Represif**

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan." Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan." Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir

tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

### 3. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.”

### 4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

Dari bentuk uraian di atas dan data yang di dapatkan oleh Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Kehutanan maka pengawasan yang di pakai adalah pengawasan preventif. selain itu pengawasan yang intensif dari instansi yang terkait guna memelihara terumbu karang yang ada di perairan Batam. maka dari itu konsep pengawasan sangat di perlukan di dalam pengelolaan terumbu karang di Batam.

Sementara itu yang menjalankan tugas pengawasan pengelolaan terumbu karang di kota batam ialah Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam berganti nama menjadi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam dan juga berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam.

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam merupakan salah satu instansi teknis dalam membantu Walikota Batam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kota Batam.
2. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 10 Tahun 2008.

2. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan, perikanan, pertanian dan peternakan serta kehutanan.
3. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.  
Pengelolaanurusanketatausahaan

Pelaksanaan pengawasan penting artinya bagi suatu organisasi baik dalam instansi pemerintah maupun swasta, karena dengan adanya pengawasan maka dapat dipenuhi kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga diperoleh kinerja yang memuaskan. Maka dari pemaparan pernyataan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **Bagaimanakah Pengawasan Pengelolaan Terumbu Karang Di Kota Batam ?**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengawasan pengelolaan terumbu karang yang di lakukan oleh instansi kelautan perikanan pertanian kehutanan di Batam
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan terumbu karang di kota Batam.

## **B. Konsep Teori**

Untuk menyederhanakan pandangan serta memperjelas arah pemikiran kita dalam pelaksanaan penelitian ini, maka perlu dikemukakan tentang konsep teori yang diangkat peneliti dalam mendukung dan mengangkat penelitian ini sehingga menjadi lebih jelas dan terarah. Peneliti mengharapkan dengan pemahaman konsep teori ini, maka akan memudahkan penyampaian informasi dari peneliti secara menyeluruh. Sebelum menjelaskan inti dari teori yang menyangkut permasalahan ini, peneliti akan menjelaskan teori secara umum ialah sebagai berikut:

### **Konsep administrasi Negara**

Menurut Dimock Dan Dimock mengatakan bahwa : Administrasi Negara merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga – lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa – bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan. Sementara itu menurut Mustafa administrasi Negara adalah sebagai gabungan jabatan – jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai kepada badan – badan pembuat undang – undang dan badan – badan kehakuman.

Wilson 1987, administrasi sebagai ilmu. Pemikiran tentang supremasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan fungsi antara politik dan administrasi, dan adanya asumsi tentang superioritas fungsi – fungsi politik administrasi. Slogan

klasik pernah juga ditawarkan manakala fungsi politik berakhir maka fungsi administrasi itu mulai, when politic end, administration begin – Wilson 1941.

Pfiffer dan Robert V, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Administrasi Negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara, untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum. Menurut Atmosudirdjo mengatakan bahwa, Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas – tugas kewajibannya tanpa Administrasi Negara.

Menurut Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara” mengatakan bahwa :

Administrasi Negara adalah gabungan jabatan atau Aparat (alat) Administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah (tugas pemerintah) fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan – badan pengadilan, badan legeslatif (pusat) dan badan pemerintah dari persekutuan – persekutuan hukum yang lebih rendah dari Negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan – badan pemerintah dari persekutuan hukum Daerah Swantatra I dan II dan Daerah istimewa, yang masing – masing diberi kekuasaan untuk berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat memerintah sendiri daerahnya.

Menurut Waldo menyatakan bahwa administrasi Negara mengandung dua pengertian yaitu :

- a. Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah.
- b. Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan – urusan Negara.

Kalau definisi – definisi diatas dikaji secara seksama, dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran bahwa :

- a. Administrasi Negara adalah merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggaraan.
- b. Administrasi Negara disusun untuk mengatur kerja sama antar bangsa.
- c. Administrasi Negara diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dari suatu Negara.
- d. Administrasi Negara diselenggarakan untuk kepentingan umum.

Fungsi Administrasi Negara Menurut Fayol

1. Planning (Perencanaan), yaitu mengembangkan adanya garis-garis besar kegiatan yang dilakukan dan mengembangkan metode-metode pelaksanaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Organizing (Pengorganisasian), yaitu mengembangkan struktur formal dari wewenang berdasarkan pengelompokan-pengelompokan kerja (misalnya departemen, biro, dinas, dll) yang perlu di koordinasikan.
3. Staffing yang meliputi keseluruhan fungsi kepegawaian : merekrut dan melatih staff serta memelihara kondisi-kondisi kerja yang menyenangkan.
4. Directing (Pengarahan) yang meliputi tugas memimpin organisasi dengan membuat keputusan-keputusan dan mengimplementasikan-nya melalui kebijakan-kebijakan prosedur.
5. Coordinating (Pengkoordinasian) yang meliputi tugas-tugas meng-integrasikan dan menyelaraskan berbagai macam unit (bagian) yang saling berkaitan.

6. Reporting (Pelaporan) yang merupakan proses dan teknik untuk memberikan informasi tentang pekerjaan yang telah dan sedang dilaksanakan (misalnya koleksi data dan manajemen informasi).
7. Budgeting (penganggaran) yang meliputi tugas-tugas perencanaan fiscal, accounting, dan pengendalian.

### **Konsep pengawasan**

Pengawasan berhubungan erat dengan perencanaan, rencana tidak akan berjalan dengan baik bila tidak ada pengawasan didalam pelaksanaannya, dengan adanya pengawasan dapat dibandingkan hasil yang sedang dicapai dengan hasil menurut rencana. Pengawasan sangat diperlukan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan, pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang salah di dalam pelaksanaannya dengan maksud apa yang dikerjakan sesuai dengan yang diinginkan

Katili (2002 : 155) mengidentifikasi pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsi-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan.

George R. Terry dalam Gunawan (2000 : 172) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan korektif sedemikian rupa hingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Siagian (2001 : 25) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang di laksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya..

Dilengkapi dengan pendapat Sastrohadiwiryo (2002 : 26 ) bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang lebih diterapkan dan tahap yang harus dilalui. Lubis (2000:153) mengidentifikasi pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu.

Bertitik tolak dari pengertian para ahli tentang pengawasan sebagaimana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan meneliti atau membandingkan pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, instuksi dalam proses pencapaian tujuan.

Berdasarkan penjelasan pengawasan diatas, maka proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan tertentu yang bersifat mendasar. Proses pengawasan itu sendiri menurut Lubis (2000:154) meliputi beberapa langkah pokok, yakni :

- a. Penentuan pedoman pekerjaan
- b. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan
- c. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi sehingga pekerjaan tersebut sesuai dengan yang direncanakan
- d. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

Sejalan dengan pandangan diatas pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai sasaran dan obyek yang diperiksa. Sedangkan secara langsung pengawasan bertujuan untuk :

- Menjamin ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang dilakukan untuk mencapai kebijaksanaan dan perintah
- Menertibkan arahan kegiatan pekerjaan
- Mencegah pemborosan dan penyelewengan dalam melakukan pekerjaan
- Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasinya yang tengah berjalan

Menurut Nawawi (2002 :4) pengawasan dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu :

- a. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dibidang pengawasan dalam membantu Presiden sebagai Administrator Pemerintahan yang tertinggi dalam mengendalikan administrasi negara . dengan kata lain, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh badan/organisasi / unit kerja yang volume dan beban kerja atau tugas pokoknya di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh badan ini terhadap aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dn pembangunan disebut sebagai pengawasan dari luar (ekstern).
- b. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap atasan terhadap bawahannya dalam mewujudkan manajemen yang sehat di lingkungan organisasi/ unit kerja masing-masing. Pengawasan ini disebut sebagai pengawasan atasan langsung sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan atasan langsung ( pengawasan intern). Untuk melaksanakan tugas pengawasan ini, setiap atasan langsung dapat melakukannya sendiri dan dapat pula menunjuk sejumlah pembantu, misalnya berupa tim tetap atau berkala.

Adapun metode pengawasan tersebut menurut Siagian (2006 : 115) meliputi :

1. Pengawasan langsung

Adalah apabila aparat pimpinan organisasi atau aparat pengawasan melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan kegiatan baik dengan sistem investigasi. Metode ini ditujukan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Pengawasan tidak langsung

Adalah apabila aparat pengawasan atau aparat pimpinan organisasi melakukan pengawasan dari jarak jauh atau melalui laporan-laporan baik secara tertulis maupun lisan.

Fungsi pengawasan terdiri dari dua jenis yaitu pengawasan preventif dan pengawasan korektif.

Dari keterangan-keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan akan dapat dipastikan bahwa aktifitas yang sedang berjalan adalah sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun fungsi pengawasan yang terdiri dari semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan kebijakan pimpinan.

Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawaasan yang dikemukakan diatas maka jelaslah pengertian yang sesungguhnya tentang pengawasan yaitu suatu upaya agar apa yang direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi terciptanya wujud dari perencanaan semula.

Dengan adanya pengawasan juga dapat mencegah suatu tindakan penyelewengan, memastikan apakah pelaksanaan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan kebijaksanaan yang telah digariskan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat menemukan hambatan-hambatan serta kesulitan sehingga dapat cepat mengambil tindakan penyesuaian dalam upaya melakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan dan kesalahan.

Abdurahman (2001:45) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang membantu pengawasan dan mencegah berbagai kasus penyelewengan yaitu:

1. Filsafat yang dianut bangsa itu
2. Agama yang mendasari orang tersebut
3. Kebijaksanaan yang dijalankan
4. Anggaran pembiayaan yang mendukung
5. Penempatan pegawai dan prosedur kerjanya
6. Kemantapan koordinasi dalam organisasi.

Akhirnya dengan melakukan tindak pengawasan secara efektif dan tindakan tegas diharapkan segala penyimpangan, pelanggaran, dan ketidaksesuaian dengan rencana dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir dan diperkecil. Dalam hal ini pimpinan harus mempunyai peran menempuh langkah-langkah kebijaksanaan demi perbaikan dan penyempurnaan sistem maupun mekanisme pengawasan di lapangan.

Dari uraian di atas jelaslah pengawasan bukan saja mengontrol tapi juga meliputi aspek penyelidikan, mengapa penyimpangan dan kelaian itu bisa terjadi, karena pengawasan juga merupakan suatu proses kegiatan yang terus menerus harus dilakukan terhadap suatu perencanaan. Sedangkan tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah agar hasil pelaksanaan kerja dapat diperoleh secara efektif dan efisien.

Kemudian ada beberapa tipe dalam melakukan pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan  
Pengawasan ini sering disebut dengan *steering control*. Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. Pengawasan Concurrent  
Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan Umpan balik (*feedback*)  
Pengawasan ini untuk mengukur suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan kata lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. (Handoko manajemen edisi ke 2 2011:18).

## Metodologi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kantor dinas kelautan perikanan pertanian kehutanan, Pemilihan lokasi ini ditetapkan karena daerah ini di lihat dari sumber daya perairannya, batam memiliki potensi sumber daya yang cukup andal apabila di kelola secara baik.



Subyek penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang pengelolaan dan pengawasan terumbu karang di kota batam. Penelitian ini dilakukan dengan metode snow ball sampling dengan mengandalkan data primer dan data sekunder dari subyek dan informan kunci. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dijawab, maka dilakukan pengolahan data secara Deskriptif kualitatif yang diolah dengan pemahaman penulis secara sederhana dan jelas. Subyek dalam penelitian ini adalah pegawai dinas kelautan kota batam dan masyarakat asli pulau sarang.

## **Pembahasan**

### **Karakteristik Subjek Penelitian**

Pada Bab ini akan dideskripsikan karakteristik yang merupakan Identitas subyek penelitian yang diperlukan untuk melihat latar belakang kehidupan subyek itu sendiri, sebagai dasar pijakan dari pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun karakteristik subyek penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah: umur subjek, tingkat pendidikan subjek, pekerjaan subyek. Yang menjadi subjek penelitian adalah 4 orang pegawai dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam, dan 4 orang masyarakat asli pulau sarang.

### **Pengawasan Oprasional Pengelolaan ekosistem terumbu karang**

Terumbu karang merupakan ekosistem yang amat peka dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan, perlu dikelola secara bijaksana, komprehensif dan terintegrasi melalui pemberdayaan masyarakat agar tingkat pemanfaatannya tidak melampaui kemampuan alamiahnya untuk pulih kembali serta perlu dilindungi dari berbagai gangguan agar dapat dimanfaatkan dalam waktu yang tidak terbatas.

Binatang karang adalah pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Binatang karang yang berukuran sangat kecil, disebut polip, yang dalam jumlah ribuan membentuk koloni yang dikenal sebagai karang (karang batu atau karang lunak). Dalam peristilahan ‘terumbu karang’, “karang” yang dimaksud adalah koral, sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu, sedangkan Terumbu adalah batuan sedimen kapur di laut, yang juga meliputi karang hidup dan karang mati yang menempel pada batuan kapur tersebut. Sedimentasi kapur di terumbu dapat berasal dari karang maupun dari alga. Secara fisik terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan oleh karang. Di Indonesia semua terumbu berasal dari kapur yang sebagian besar dihasilkan koral. Di dalam terumbu karang, koral adalah insinyur ekosistemnya. Sebagai hewan yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya, karang merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem tersebut. Jadi Terumbu karang (coral reefs) merupakan ekosistem laut tropis yang terdapat di perairan dangkal yang jernih, hangat (lebih dari 22oC), memiliki kadar CaCO<sub>3</sub> (Kalsium Karbonat) tinggi, dan komunitasnya didominasi berbagai jenis hewan karang keras.

#### **1. Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Terumbu Karang**

1. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam *ordo Hexacoralia, Filum Cnidaria*, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis mutualistik dengan *zooxanthellae*.

2. Terumbu Karang adalah struktur dalam laut dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sementasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur, dan organisme yang mensekresikan kapur.
3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
4. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang meliputi perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi dan penegakan hukum serta pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya;.
5. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk pengelolaan terumbu karang melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah.
6. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/ instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pengelolaan di zona yang ditetapkan.
8. Rencana Aksi adalah tindak lanjut rencana pengelolaan terumbu karang yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya terumbu karang disetiap kawasan perencanaan.
9. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumberdaya laut dan jasa lingkungannya dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pengelolaan terumbu karang.
10. Degradasi adalah penurunan kualitas atau penurunan daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.
11. Pemanfaatan adalah penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan dalam hal sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak melampaui kemampuan memperbaharui dirinya.
12. Konservasi adalah upaya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.

Sumber :Perda provinsi Kepri No 3 tahun 2010

*“Perda tentang pengelolaan ekosistem terumbu karang memang sudah ada. Tetapi standarnya saya belum ketemu, bukan tidak ada tetapi belum ada, hal inilah yang terkadang menyulitkan kami untuk melakukan tindakan-tindakan*

*tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan.”(Wawancara Kepala dinas kelautan perikanan perkebunan dan kehutanan, 05 April 2013).*

### **Pengamatan pengawasan terumbu karang**

Pengelolaan terumbu karang secara lestari dan berkembang sangat penting artinya. Ekosistem terumbu karang yang sangat produktif dapat mendukung kehidupan nelayan setempat. Jika habitat terumbu karang dapat berfungsi secara optimal, maka produksi ikan karang akan dapat dipanen secara berkesinambungan dan memberi keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat di seluruh Indonesia untuk masa kini dan masa yang akan datang sejalan dengan pembangunan nasional.

Pada saat ini pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dan pihak swasta serta masyarakat masih sedikit sekali perhatiannya terhadap ekosistem terumbu karang dan habitat sekitar yang berasosiasi dengannya. Oleh karena itu pada saat ini dari segi pendidikan yang berwawasan lingkungan pada umumnya dan ekosistem terumbu karang pada khususnya perlu ditingkatkan. Program latihan dan pendidikan baik formal dan non formal perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan pemanfaatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya terumbu karang.

Pemantauan pengelolaan terumbu karang yang dilaksanakan oleh anggota dinas kelautan kota batam dilakukan dengan cara pemantauan langsung ke lapangan berupa patroli dan razia. Patroli merupakan salah satu bentuk langsung dari pengawasan operasional pengelolaan terumbu karang di kota batam. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat serta upaya penegakan Peraturan Daerah yang ada.

Setiap pengawasan atau kontrol kebijakan harus selalu dilaksanakan secara berkalan atau jika perlu dapat bersifat kondisional untuk situasi yang insidental jadwal pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara triwulan sehingga diharapkan lebih efektif dan tidak menghabiskan anggaran yang terlalu besar.

*”Memang alangkah lebih baiknya pengawasan dilakukan secara bulanan kalau untuk sekarang kami biasa melakukan pengawasan pada awal bulan saja. Intensitas memang kurang kami lakukan tetapi kami juga melakukan upaya agar pengawasan ini terus berlangsung agar kelestarian terumbu karang di pulau sarang dapat terus terjaga.(Wawancara Kepala Seksi Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 05 April 2013).*

Rendahnya peraturan dan penegakan hukum tidak terlepas dari rendahnya kualitas SDM baik dikalangan masyarakat maupun aparat hukum yang berada di wilayah pesisir. Lemahnya peraturan dan penegakan hukum tercermin dari sikap dan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang masih rendah, khususnya yang berhubungan dengan UU No. 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Demikian juga halnya dengan peneakan terhadap peraturan tentang jalur-jalur penangkapan ikan yang tertuang dalam Kepmentan No. 392/kpts/IK 120/4/99.

Beberapa masalah yang sering timbul berkaitan dengan rendahnya ketaatan dan penegakan hukum, antara lain banyaknya nelayan yang menangkap ikan dengan alat yang

tidak ramah lingkungan seperti penggunaan bahan peledak atau racun, serta perambahan hutan mangrove secara ilegal di daerah jalur hijau (green belt).

*“Masih banyak nelayan-nelayan di pulau sarang menangkap ikan dengan cara-cara yang ilegal, merka masih ada yang menggunakan bom ikan, menggunakan potasium atau racun-racun ikan yang lain, hali ini akan sangat berbahaya bagi kelastarian terumbu karang di pulau sarang, kesulitan kami untuk menindak tegas para pelaku karena jumlah mereka yang banyak dan kami tidak memilik bukti-bukti yang kuat untuk menangkap para nelayan nakal itu. (Wawancara petugas pengawas Bidang Sumberdaya Kelautan dan Perikanan , 10April 2013).*

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa bidang sumberdaya kelautan telah memiliki jadwal pemantauan atau patroli dan razia yang telah ditetapkan sebenarnya dapat mengefektifkan pengawasan karena dengan jadwal yang telah ditetapkan dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi, namun dikarenakan jumlah nelayan yang masih nakal dan terbatasnya jumlah personil pengawasan dilapangan maka terkadang mesih juga nelayan-nelayan itu dapat melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tanpa diketahui oleh oknum pengawas.

Dalam melakukan pemantauan, oknum pengawas yang kegiatannya mengawasi tentang adanya gangguan terhadap lingkungan dan perusakan terumbu karang oleh masyarakat. Jika tertangkap nelayan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun jika pelaku belum tertangkap maka pihak pengawas akan melakukan investigasi guna menemukan siapa pelaku perusakan terumbu karang.

### **Menetapkan Pengelolaan Terumbu Karang**

Pengelolaan ekosistem terumbu karang pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia, agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan. Apabila dilihat permasalahan pemanfaatan sumberdaya ekosistem terumbu karang yang menyangkut berbagai sektor, maka pengelolaan sumberdaya terumbu karang tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun harus dilakukan secara terpadu oleh beberapa instansi terkait.

Dasar pemikiran pengelolaan terumbu karang seharusnya yaitu terumbu karang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang harus dikelola dengan bijaksana, terpadu dan berkelanjutan dengan memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dan stakeholders (pengguna) guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dan pengguna secara berkelanjutan (sustainable).

keterampilan serta budaya. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas keterampilan maupun budidaya kelompok masyarakat pesisir. Berorientasi pasar (market oriented), artinya model pembangunan masyarakat pesisir berbasis masyarakat yang diterapkan harus berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor dengan cara membangun jaringan ekonomi masyarakat lokal yang berorientasi global yang didukung oleh kemampuan teknologi komunikasi dan informasi.

Prinsip utama pengelolaan berbasis masyarakat adalah, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pengelolaan mulai dari penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan, hingga evaluasi terhadap hasil-hasil yang dicapai. Dengan demikian pola pendekatan yang dilakukan adalah dari bawah ke atas (bottom up) yang dipadukan dengan dari atas ke bawah (top down), hal ini belajar dari pengalaman kegagalan pembangunan pada masa lalu yang cenderung menggunakan top down saja, dan sejalan dengan paradigma baru pembangunan sekarang prinsip aspiratif dan partisipatif masyarakat lebih ditonjolkan. Program ini akan lebih terjamin keberlanjutannya karena masyarakat pesisir sebagai kelompok yang paling mengetahui kondisi wilayah pesisir dan lautan

sekitarnya menjadi diberdayakan dan didudukkan sebagai subyek dalam proses kegiatan program sehingga mereka memiliki dan bertanggung jawab akan program-program yang dilakukan.

### **Tahapan Pengelolaan Berbasis Masyarakat**

Perencanaan diatur melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan pembangunan dari berbagai tingkat pemerintahan; antara ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen. Perencanaan pengelolaan sumberdaya terumbu karang dilakukan agar dapat mengharmonisasikan kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelestarian sumberdaya pesisir dengan memperhatikan karakteristik dan keunikan wilayah pesisirnya.

Perencanaan terpadu ini merupakan suatu upaya bertahap dan terprogram untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir secara optimal agar dapat menghasilkan keuntungan ekonomi secara berkelanjutan untuk kemakmuran masyarakat. Rencana bertahap tersebut disertai dengan upaya pengendalian dampak pembangunan sektoral yang mungkin timbul dan mempertahankan kelestarian sumberdayanya. Misalnya perencanaan wilayah pesisir yang diatur dibagi kedalam empat tahapan: (i) Rencana Strategis; (ii) Rencana Zonasi; (iii) Rencana Pengelolaan; dan (iv) Rencana Aksi/ Tahunan, harus melibatkan semua stakeholder yang termasuk masyarakat lokal, tokoh agama dan adat daerah pesisir dan laut.

Pengelolaan terumbu karang dilaksanakan secara terpadu dengan mengakomodasikan berbagai kepentingan menjadi suatu sistem yang serasi dan saling menguntungkan, sehingga kegiatan masing-masing sektor dapat saling mengisi dan mendukung, serta saling melengkapi dengan kegiatan pembangunan daerah dan masyarakat pesisir.

Pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat adalah pengelolaan secara kolaboratif antara masyarakat, pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang ada dalam masyarakat yang bekerja sama dalam mengelola kawasan terumbu karang yang sudah ditetapkan/disepakati bersama. Tujuan dari pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat adalah untuk menjaga dan melindungi kawasan ekosistem atau habitat terumbu karang supaya keanekaragaman hayati dari kawasan ekosistem atau habitat tersebut dapat dijaga dan dipelihara kelestariannya dari kegiatan-kegiatan pengambilan atau perusakan. Selain itu, lewat pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat maka produksi perikanan di sekitar lokasi terumbu karang yang dikelola/dilindungi dapat terjamin dan dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya.

Pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terencana dengan memperhatikan karakteristik wilayah pesisir, keunikan, geomorphologi pantai dan kondisi ekosistem pesisir serta ukuran pulau. Dengan demikian, pengelolaan terumbu karang di suatu wilayah akan bervariasi sesuai dengan perbedaan karakteristik dan keunikan wilayah pesisir tersebut.

Terumbu karang yang dilindungi oleh masyarakat dapat juga dikembangkan sebagai lokasi pendidikan dan penelitian keanekaragaman hayati ekosistem dan habitat bagi institusi pendidikan (SD, SMP, SMU, Universitas, dll.) serta dikembangkan sebagai lokasi pariwisata ramah lingkungan (ekowisata) yang dapat memberikan kesempatan usaha wisata berbasis-masyarakat.

Pengelolaan terumbu karang berbasis-masyarakat juga memberikan legitimasi dan pengakuan terhadap hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola terumbu karang dan sumberdaya pesisir dan laut yang ada di sekitar mereka. Supaya masyarakat dapat mengetahui secara langsung bagaimana keadaan terumbu karang yang ada di daerahnya maka mereka perlu dilatih untuk melakukan pemantauan sendiri. Setelah mereka mengetahui kondisi terumbu karang yang ada maka diharapkan akan timbul kepedulian mereka yang lebih tinggi untuk menjaga kelestariannya.

*“Orang dari dinas kelautan memang pernah datang dan melakukan acara-acara tentang pengolahan hasil laut, namun karena kami tidak terlalu mengerti dan tidak paham dengan apa yang diberikan oleh orang dinas itu. Setelah mereka tidak ada kami menangkap ikan dengan cara kami sendiri yang sudah kami gunakan sejak zaman dahulu”.*(wawancara dengan salah seorang nelayan Kota Batam)

## **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul pengawasan terumbu karang di kota batam pulau sarang ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat terumbu karang antara lain sebagai pelindung ekosistem pantai, terumbu karang sebagai penghasil oksigen, rumah bagi banyak jenis mahluk hidup, sumber obat-obatan, objek wisata, daerah Penelitian dan dari sisi sosial ekonomi terumbu karang menjadi sumber perikanan yang produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan, penduduk pesisir, dan devisa Negara yang berasal dari devisa perikanan dan pariwisata. Perusakan terumbu karang juga terjadi di pulau sarang kota batam, kerusakan yang terjadi disebabkan oleh cara mencari ikan yang salah masih dipertahankan padahal hal ini dapat merusak ekosistem laut.
2. Upaya yang telah dilakukan dinas kelautan kota batam dilakukan untuk meminimalisir Kerusakan Terumbu Karang antara lain peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat nelayan mengenai penangkapan ikan secara illegal, Penanganan nyata lain untuk memperbaiki ekosistem terumbu karang yang marak dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat adalah dengan membudidayakan terumbu karang, Melakukan penegakan hukum mengenai perikanan khususnya dalam hal pemanfaatan yang disalah gunakan oleh masyarakat.
3. Berdasarkan dari pembahasan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat secara intensif, karena pengawasan yang lebih intensif dapat mengendalikan tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

## **Saran**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan pengelolaan terumbu karang di kota batam pulau sarang , penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar dinas kelautan dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan terumbu karang dapat lebih baik dan dalam segi waktu yang lebih intensif, serta lebih peka terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan-ketentuan operasional di lapangan,

- dan melakukan tindakan evaluasi terhadap setiap kekurangan-kekurangan dan hambatan dalam pengawasan operasional pengawasan yang dapat dilakukan dengan salah satu upaya yaitu manajemen lebih baik dalam bidang pendataan laporan-laporan pelanggaran yang terjadi setiap siklusnya sehingga dapat menjadi penilaian dalam pengawasan pengelolaan terumbu karang di pulau sarang yang dengan ini dapat mencari sebab, akibat, dan solusi untuk mengatasi setiap kendala, hambatan yang dihadapi selama pengawasan agar mencapai atau mewujudkan perubahan yang lebih baik ke depan.
2. Diharapkan pada dinas kelautan kota batam dapat menambah personil pengawas lapangan dan peningkatan mutu pengawasan di lapangan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih optimal. Karena ini sangat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi masih belum optimalnya pengawasan pengelolaan trumbu karang, dan juga diharapkan dinas kelautan lebih dapat memperbaiki sistem pengawasannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Handoko,T.Hani. 2011. Manajemen Edisi ke 2.Yogyakarta : BPFE
- Harbani,Pasolong.2012.Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung:Alfabeta
- Inu Kencana,Syafie. 2006 Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : Rineka Cipta
- Sahya,Anggara. 2012 Ilmu Administrasi Publik. Bandung : Pustaka Setia
- R,George,Terry,Winardi. 2006. Asas-Asas Manajemen. Bandung : PT Alumn Brantas.
- Hasibuan,Malayu S.P. 2005. Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta : Bumi Aksara.
- Massie, Joseph L. Hadisoeprobo, Ignatius. 1985. Dasar-Dasar Manajemen,Edisi ke tiga(Terjemahan Essentials Of Management, Third Edition). Jakarta : Erlangga.
- Griffin, Rcky W. Gania,GINA. 2004. Manajemen, Edisi Ketujuh (Terjemahan Management, Seven Edition). Jakarta:Erlangga.
- Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:PT.Bumi Aksara
- Lubis, Ibrahim. 2000. Pengendalian Dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pamudji,S. 2004. Ekologi Administrasi Negara. Jakarta : PT Bumi Aksara
- <http://noloyudho.blogspot.com/2011/06/makalah-ekologi-administrasi.html>
- <http://zakaaditya.blogspot.com/2011/11/fungsi-administrasi-negara.html>
- <http://carapedia.com/pengertian-definisi-administrasi-menurut-para-ahli-in48o480.html>